

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA  
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

# Baubau

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

# Post

Rabu  
20 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## Dr Muh Rasman Manafi: Pelaku Usaha Produk Pangan Wajib Miliki SLHS Untuk Jaga Produk Pangan Penuhi Standar Kesehatan



Pj walikota Baubau H Muh Rasman Manafi hadir sosialisasi sertifikasi SLHS untuk produk pangan

Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

**BAUBAU, BP--**Pola konsumsi masyarakat terus meningkat terutama konsumsi pangan. Hal tersebut terbukti misalnya dengan perkembangan pesat usaha catering, depot air minum yang hari ini dapat ditemui hampir di seluruh sudut Kota Baubau.

Namun demikian, pola konsumsi masyarakat tentu merupakan pendorong utama saja un-

Lanjutan ke Hal: 7

## Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Baubau



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau mengadakan acara kick off meet-

ing Rencana Kerja Per-  
angkat Daerah (RKPD)  
Senin (18/11/2024) yang  
dihadiri langsung oleh  
Pj Wali Kota Baubau Dr  
H Muh Rasman Manafi,  
SP, M.Si, Kepala OPD,

anggota DPRD Kota  
Baubau. Dalam sambutannya  
Pj Wali Kota Baubau  
mengungkapkan, kick

Lanjutan ke Hal: 7

## Komisi III DPR Usul Wartawan Tak Lagi Wawancara Doorstop di KPK

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman mengusulkan agar wartawan tak lagi melakukan wawancara cekat atau doorstop kepada pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Habiburrokhman,

dan Dewas KPK cukup memberikan pernyataan lewat konferensi pers.

“Kalau perlu menurut saya ya, level pimpinan dan dewasa itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada doorstop,

Lanjutan ke Hal: 7

## Ketua Bawaslu Usul Pemilu dan Pilkada Tak Digelar di Tahun yang Sama



Ketua Bawaslu Usul Pemilu dan Pilkada Tak Digelar di Tahun yang Sama.

JAKARTA- Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berpendapat penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu nasional tak digelar pada

tahun yang sama. Pada tahun ini, Pemilu nasional digelar pada

Lanjutan ke Hal: 7

## Yusril Sebut Pemindahan Mary Jane ke Filipina Desember 2024



Yusril Ihza Mahendra bertemu Dubes Filipina di Jakarta, Gina A Jamoralin.

Pewarta: Lisna

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan

Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina

akan dilakukan pada Desember 2024.

“Perkiraan proses pemindahan Mary Jane

Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA  
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post  
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi  
per Tanggal 30 Desember 2022



## Dr Muh Rasman Manafi: Pelaku Usaha Produk Pangan Wajib Miliki SLHS Untuk Jaga Produk Pangan Penuhi Standar Kesehatan

tuk peningkatan produksi pangan di Kota Baubau. Dan ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat akan kualitas produk pangan terutama di Baubau saat ini sudah masuk pada kategori aman baik dari kualitas maupun kebersihannya. Karenanya, upaya menjaga kepercayaan masyarakat akan produk pangan yang beredar di Kota Baubau salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu memenuhi standar kesehatan yang diimplementasikan oleh setiap pelaku usaha produk pangan ha-

rus menjalankan usahanya dengan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sehat (SLHS). Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka kegiatan Bimtek sosialisasi implementasi perizinan berbasis risiko dengan tema SLHS di Baubau Selasa (19/11/2024). Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, SLHS ini juga mengatur keamanan mutu dan gizi pangan yang diperjual belikan di Kota Baubau. Kelayakan us-

aha menerima slhs didasarkan pada higienitas penerimaan bahan mentah makanan terolah. Pembuatan pengubahan bentuk pengemasan pewadahan pengangkutan dan penyajian tujuannya adalah untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan agar aman dikonsumsi. "Se cara umum SLSH ini merupakan perhatian pemerintah dalam bentuk lain dari pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat selaku konsumen serta upaya untuk memberikan

jaminan kehygienisan serta menurunkan risiko gangguan kesehatan yang dituangkan dalam bentuk SLHS," ujarnya. D i t a m b a h k a n , pelaku usaha dapat memiliki SLHS dengan cara memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan persyaratan kesehatan dan ketenagaan pangan olahan siap saji. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. (\*)

## Yusril Sebut Pemindahan Mary Jane ke Filipina Desember 2024

akan dilakukan di bulan Desember 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (20/11).

Yusril menjelaskan telah menerima permohonan pemindahan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Ia menyebut permohonan itu juga telah dibahas bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," jelasnya.

Meski telah disetujui oleh Presiden Prabowo, Yusril menegaskan proses pemindahan terhadap narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane baru bisa dilakukan apabila syarat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Pemerintah Filipina. Ia menuturkan

syarat pertama yakni Filipina harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Ketiga, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

Yusril menjelaskan apabila nantinya proses pemindahan narapidana atau transfer of prisoner terhadap Mary Jane benar-benar terealisasi, maka kewenangan pembinaan bakal diserahkan kepada pemerintahan Filipina.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut

beralih menjadi kewenangan negaranya," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut tidak menutup kemungkinan Mary Jane akan terbebas dari hukuman mati lewat grasi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.

Yusril mengatakan pemberian grasi tersebut bisa saja terjadi dikarenakan saat ini hukum pidana yang ada di Filipina telah m e n g h a p u s k a n pidana mati.

"Mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup," tuturnya.

"M e n g i n g a t pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," imbuhnya. (\*)

## Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Baubau

of meeting intinya sebagai titik awal memulai sesuatu dan apa yang dibicarakan dalam meeting setidaknya 3 hal yakni yang pertama menyamakan persepsi bahwa akan memulai bersama untuk menuju sesuatu. Kemudian, yang ke dua selain menyamakan persepsi, menetapkan time line atau titik penting jalan untuk menuju kesana dan untuk menuju kesana sudah satu persepsi.

Yang ketiga, kick off meeting itu harus bisa membedakan atau memahami apa yang menjadi

tugas atau apa yang menjadi tanggungjawab dan apa yang menjadi tanggungjawab orang. Sebab, jangan sampai sudah sama-sama bersepakat tapi mengerjakan tugasnya orang lain. Sementara tugasnya tidak dilakukan dan itu sebenarnya diawal yang perlu digali dalam satu pertemuan.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengaku sangat menyambut baik kegiatan kick off meeting RKPD karena perencanaan yang telah dimulai dengan baik akan

menyelesaikan permasalahan setidaknya 50 persen sudah punya modal itu. Akan tetapi, perencanaan yang tidak tepat akan mendapatkan permasalahan 50 persen sehingga dengan demikian perencanaan sangat penting.

Dijelaskan, RKPD ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan visi Baubau 20 tahun kedepan yang sudah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk mewujudkan visi Baubau. "Pres-

iden kita Prabowo dan Wapres Gibran sudah merumuskan dan sudah menetapkan ada visi pembangunan Indonesia dengan visinya ada 8 disebut astacita dan 17 program turunan dari astacita itu. Dan dari 17 program itu dipilih program hasil terbaik cepat yang bisa langsung dirasakan efeknya terhadap pencapaian yang sering kita kenal dengan istilah quick win. Kita juga sudah harus menjabarkan apa yang kita diskusikan dengan program terbaik hasil cepat atau quick win akan kita letakkan dalam membangun Kota Baubau yang kita sudah tahu," jelasnya. (\*)

## Komisi III DPR Usul Wartawan Tak Lagi Wawancara Doorstop di KPK

Pak," kata Habib dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewas KPK Benny Mamoto di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Ia berpendapat KPK sebagai lembaga yang masuk rumpun eksekutif dituntut lebih banyak menunjukkan kerja nyata. Maka, tak perlu banyak bicara seperti lembaga legislatif.

Politisi Partai Gerindra itu berka pada pengalaman dan Dewas KPK periode lalu yang kerap berseteru di ranah publik. Padahal, kata dia, dua lembaga itu mestinya fokus dengan kerja masing-masing.

Habib menilai kondisi itu disebabkan doorstop media, sehingga memunculkan beragam tafsir di ruang publik.

"Kadang-kadang seolah-olah seperti ada doorstop dan lain sebagainya ya kan. Lalu bicara di tafsirkan orang bermacam-macam," tuturnya.

Selain itu, kata dia, KPK adalah lembaga yang bekerja di ranah hukum. Habib ingin KPK seperti pengadilan yang berbicara lewat putusan.

"Kalau zaman dulu enggak ada (doorstop) setahu saya. Makanya di zaman dulu lebih tetap dalam konteks komunikasi. Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di

doorstop bicara soal perkara. Ya kan? Apakah capim, apakah Dewas ya? Apakah pimpinan, apakah Dewas? Yang mempunyai efek ya kadang-kadang damage yang luar biasa," ujar dia.

Merespons itu, Benny mengaku sepakat. Dia ingin wawancara hanya dilakukan lewat juru bicara. Di luar itu, pernyataan bisa disampaikan lewat rilis resmi.

"Dan itu sangat merugikan institusi, oleh sebab itu menurut kami memang lebih tepat biarlah juru bicara yang menyampaikan rilisnya. Kemudian hal-hal teknis bila diperlukan, dihadirkan," katanya. (\*)

## Ketua Bawaslu Usul Pemilu dan Pilkada Tak Digelar di Tahun yang Sama

Februari dan Pilkada serentak pada November 2024.

"Seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah, tidak dalam satu tahun," kata Bagja dalam pidatonya di Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024, Monas, Jakarta, Rabu (20/11).

Bagja mengaku

mendengarkan aspirasi para panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang cukup letih karena pelaksanaan gelaran demokrasi itu berlangsung secara berdekatan.

Ia mengatakan kerja Panwascam menjadi sangat berat karena pelaksanaan pemilu dan pilkada berdekatan.

"Kegelisahan teman-teman sudah kami sampaikan kepada mas wapres," ucapnya.

Hanya berselang sembilan bulan penyelenggaraan Pemilu dengan Pilkada serentak 2024.

Hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu. Pemilu nasional itu meliputi

pemilihan presiden, pileg meliputi DPR dan DPRD, dan DPD RI.

Sementara pemungutan suara Pilkada serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang. Pilkada serentak 2024 ini diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia. (\*)

## Johanis Tanak Mau Hapus OTT Jika Jadi Ketua KPK, DPR Tepuk Tangan



Johanis Tanak dapat dukungan saat ingin hapus OTT kalau jadi Ketua KPK

### Laporan: Hadi

JAKARTA- Sejumlah anggota dewan di Komisi III DPR bertepuk tangan saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku akan menghentikan operasi tangkap tangan (OTT) jika menjadi Ketua KPK.

Johanis hadir sebagai calon pimpinan KPK untuk periode 2024-2029 dan menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Dalam paparannya, Tanak menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.

“Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” kata Tanak disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Secara terminologi, Tanak yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak 2022 itu menilai definisi OTT tidak tepat. Merujuk KBBI, kata dia, operasi adalah serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan laiknya dilakukan seorang dokter.

Sementara menurut KUHAP, tertangkap

tangan menghendaki penangkapan yang dilakukan seketika dan tanpa perencanaan.

Selain itu, dia menjelaskan konsep OTT sebagaimana berlaku saat ini juga dilakukan berdasarkan surat perintah. Artinya, kata dia, hal itu sudah direncanakan.

“Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat,” katanya.

Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Rudianto Lallo pada kesempatan itu meminta pendapat Tanak soal konsep OTT. Dia merujuk pernyataan salah seorang pejabat tinggi negara yang menyebut OTT kampanye.

“Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa? Karena begitu banyak org yg sudah di OTT, begitu banyak orang yang keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera,” kata Lallo.

“Ataukah misalkan

ke depan Pak Johanis Tanak lebih lebih fokus pada pengembalian kerugian negara,” imbuhnya.

Johanis Tanak saat ini masih menjadi wakil ketua KPK. Ia mulai Oktober 2022 menggantikan Lili Pintaui Siregar yang mengundurkan diri karena skandal dugaan gratifikasi dari PT Pertamina terkait akomodasi dan tiket menonton MotoGP Mandalika.

Awalnya dia gugur dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK periode 2019-2024 di DPR RI.

Pemilihan Johanis Tanak sebagai pengganti Lili Pintaui Siregar mengundang kritikan sejak awal. Pasalnya, Johanis sempat mengusulkan mengusulkan koruptor bisa mendapat jaminan tak diproses secara hukum dengan syarat mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 2019, Johanis juga mendapatkan kritikan karena sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK. Dia saat itu sepakat dengan pembentukan Dewan Pengawas dan

pemberian kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Saat ini, Johanis Tanak menjadi salah satu yang diperbincangkan dalam seleksi capim KPK periode 2024-2029. Johanis sempat terjerat kasus dugaan pelanggaran etik. Kendati akhirnya ia diputuskan tak bersalah.

Kasus ini berawal dari percakapan atau chat Johanis Tanak dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Percakapan yang berisi ‘bisalah kita cari duit’ itu sempat viral di media sosial.

Idris Sihite pernah diperiksa KPK pada kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Selain itu, Idris sempat terlibat dalam kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK.

Sementara itu, Johanis Tanak menyatakan chat tersebut terjadi sebelum adanya perintah penyelidikan. Selain itu, ia mengaku tidak tahu Idris sudah menjadi Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerba. Ia mengira Idris masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM.

Majelis Etik Dewas KPK akhirnya memutuskan Johanis Tanak tak bersalah. Anggota Majelis Etik Dewas KPK, Albertina Ho, menyatakan Johanis hanya terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai komunikasi yang telah dilaksanakan dengan pihak lain. (\*)



Masyarakat berbondong-bondong mendatangi posko pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’ di Istana Wapres.

### Laporan: Hadi

JAKARTA- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menebus ijazah siswa sekolah swasta yang sempat ditahan selama dua tahun usai melapor ke ‘Lapor Mas Wapres’.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Gibran telah membantu 20 persoalan yang diajukan warga ke ‘Lapor Mas Wapres’ untuk diselesaikan.

“Persoalan penebusan ijazah terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan satu tahun, dua tahun belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden,” kata Hasan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11).

Tak hanya persoalan ijazah yang ditahan, Hasan mengatakan Gibran membantu warga yang sempat dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS).

Usai melapor ke Lapor Mas Wapres, lanjut Hasan, warga ini kemudian dapat terdata kembali namanya di sistem DTKS dan bisa mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah.

“Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir,” kata dia.

Di sisi lain, Hasan mengatakan Gibran membantu menyelesaikan laporan warga lantaran sesuai amanah dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo meminta supaya pemerintah dapat mempermudah layanan kepada masyarakat.

“Sehingga Lapor ini hadir untuk memperkuat responsifitas, responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan persoalan-persoalan masyarakat,” kata dia.

Meski begitu, Hasan mengatakan masih ada laporan warga yang seka-

dar iseng masuk ke ‘Lapor Mas Wapres’. Ia mengungkapkan salah satunya ada warga yang berjanji bisa menghentikan Lumpur Lapindo hingga laporan soal konflik rumah tangga.

“Jadi, ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk, karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng. Dengan insinuasasi-insinuasasi tertentu kemudian laporan itu sangat iseng lah,” kata dia.

Gibran sebelumnya meluncurkan program ‘Lapor Mas Wapres’ sejak 11 November 2024 lalu. Warga bisa langsung datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wapres untuk melaporkan masalah atau keluhannya. Posko ini beroperasi setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-14.00 WIB.

Selain posko, warga juga bisa menyampaikan keluhan melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207. (\*)

ber energi ramah lingkungan.

“Saya pikir Brasil lebih maju dibandingkan kita dalam penggunaan energi ramah lingkungan melalui solar, memproduksi solar dari minyak sawit,” ujar dia.

Di sisi lain, Prabowo menekankan Indonesia berdedikasi untuk menciptakan iklim bisnis yang positif guna keber-

langsungan pertumbuhan ekonomi.

“Kami mengarahkan investasi. Kami berdedikasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif,” tutur Prabowo.

Prabowo juga menekankan sejumlah hal di antaranya pentingnya ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam fo-

rum ini.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran menjanjikan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat sebagai program kampanye Pilpres 2024 lalu. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. (\*)

## Prabowo Bentuk Tim Khusus Pelajari Makan Bergizi Gratis di Brasil

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk tim untuk mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang

diterapkan di Brasil.

Menurutnya, Indonesia ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang telah menjalankan pro-

gram Makan Bergizi Gratis dan energi terbarukan.

Di momen yang sama, Prabowo juga mengungkapkan ingin belajar

dari Brasil terkait implementasi energi terbarukan. Prabowo optimis Indonesia bisa merealisasikan hal tersebut karena memiliki banyak sum-

## HKN ke-60 mengusung tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama”



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Upacara tersebut digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Senin pagi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Tk I Sultra atau yang mewakili, Kapolda Sultra, Danrem, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekda Sultra, pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, serta para pimpinan kementerian dan lembaga di wilayah Sultra. Juga hadir Komandan TNI se-Sultra, Danlanud, Danlanal, pimpinan perguruan tinggi di Sultra, termasuk Rektor Universitas Mandala Waluya, Ketua STIKES Pelita Ibu, Ketua

STIKES Budi Mulia Kendari, Direktur Poltekkes, Direktur RS pemerintah dan swasta.

Ketua organisasi profesi kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra turut memeriahkan upacara ini.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga kesehatan masyarakat Sultra. “Saya atas nama seluruh rakyat Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mari kita terus berkolaborasi menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik menuju generasi emas 2045,” ujar Andap Budhi Revianto.

Beliau juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai pondasi utama untuk mencetak sumber daya manusia yang sehat dan cerdas

sebagai kunci kemajuan bangsa. “Sering saya sampaikan, kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti,” tambahnya.

Dalam upacara tersebut, Pj. Gubernur Sultra juga membacakan sambutan resmi dari Menteri Kesehatan RI, yang menyoroti keberhasilan Indonesia kembali masuk dalam kelompok upper middle-income country setelah masa sulit di era Covid-19. “Ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Namun, kita harus tetap berusaha lebih baik untuk menghadapi tantangan ke depan,” ungkapnya.

Periode bonus Demografi yang sedang dialami Indonesia menjadi peluang emas untuk memajukan bangsa. Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2045, seperti pendapatan per kapita setara

negara maju, pengurangan kemiskinan hingga 0%, dan pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emissions, harus diupayakan bersama.

Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam transformasi kesehatan, yaitu:

1. Pemeriksaan kesehatan gratis,
2. Penurunan kasus TB, dan
3. Pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil.

Upacara HKN ke-60 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun kesehatan yang berkelanjutan.

Di akhir acara, Pj. Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. “Mari kita bangun budaya sehat demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Selamat Hari Kesehatan Nasional 2024: Sehat Negeriku, Maju Indonesiaku!. (\*)

## Dorong Hilirisasi dan Ketahanan Energi Pemprov Sultra selenggarakan Rakor Rencana Rosatom Investasi PLTN di Sultra



SULTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Senin (18/11/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Federasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Selain itu, hadir pula Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T. (Anggota Dewan Energi Nasional), sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Sekda Sultra menekankan bahwa Provinsi Sultra memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi tersebut kini diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mendukung pembangunan industri berbasis nikel.

“Hilirisasi membutuhkan energi be-

sar. Saat ini, pasokan energi di Sultra masih didominasi batu bara (76%), minyak bumi (19%), dan gas bumi, sementara energi terbarukan hanya 5%. Dengan kebutuhan listrik industri pertambangan yang diproyeksikan mencapai 4,02 MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penyediaan energi bersih, stabil, dan efisien,” ungkapnya.

Rencana investasi Rosatom tidak hanya memenuhi kebutuhan energi jangka panjang tetapi juga mendukung keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan target global pengurangan emisi karbon. Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi penyelenggaraan Rakor ini sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Rusia yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia.

Duta Besar menyebutkan, dalam pertemuan dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas pengembangan kerja sama energi nuklir yang melibatkan transfer teknologi dan pendidikan. Pertemuan itu juga juga Pemerintah Rusia menawarkan peluang beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya dari

Sultra, untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM di bidang Energi Nuklir.

Selain itu, Anna Belokoneva dari Rosatom menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang telah teruji keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menyampaikan bahwa pengembangan Energi Nuklir sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang baru, menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060.

Rakor ini diakhiri dengan diskusi, sesi tanya jawab, dan penyerahan cendera mata dari Anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia yang dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN, mendukung Hilirisasi Industri, dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi Tenggara. (\*)

## Pj. Bupati Buton Tatap Muka dan Rakor di Kapontori



**Pewarta: Rahman**

BUTON, BP-Pj Bupati Buton, La Haruna, SP, MSi menghadiri rapat koordinasi sekaligus tatap muka bersama Kepala Desa, BPD Desa, Kepala Puskesmas Lingkup Kecamatan Kapontori di Aula Kantor Camat Kapontori, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam rapat tersebut, Pj. Bupati Buton bersama para Kepala Desa, BPD, Kepala Sekolah, dan

Kepala Puskesmas Lingkup Kecamatan Kapontori serta bersama kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton membahas pengelolaan pembangunan yang ada di Kecamatan Kapontori.

“Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menghadapi Pilkada pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Saya harapkan seluruh kepala Desa/Lurah menyampaikan masyarakat agar saling menjaga diri sehingga pelaksanaan

pesta demokrasi berjalan dengan aman dan tertib,” kata Pj. Bupati Buton.

Pj Bupati juga menegaskan kepada seluruh masyarakat khususnya Kecamatan Kapontori agar menggunakan hak pilihnya dengan memilih pimpinan yang terbaik sesuai hati nuraninya masing-masing dalam menentukan pimpinan yang akan menjabat selama 5 tahun kedepan.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat,

para kepala desa yang ada di Kecamatan Kapontori untuk meningkatkan netralitas agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu dalam menghadapi pilkada mendatang,” katanya.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Pj. Bupati dan peserta, di mana para kepala desa serta tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai hal yang memerlukan perhatian pemerintah. (\*)

## Pemkab Buton Gelar FGD Evaluasi Satu Data Indonesia Dan Pencanaan Desa Cantik

**Pewarta: Rahim**

BUTON, BP-Pj Bupati Buton yang diwakili Staf Ahli Butpati Buton Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, H. Abdul Rais, SP membuka dengan resmi Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Melaunching Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 di Aula Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Buton yang dibacakan Sahli, H. Abdul Rais, SE mengatakan data sangat penting dan sangat dibutuhkan terutama untuk digunakan sebagai dasar perencanaan, pembuat keputusan,



alat kontrol, maupun evaluasi baik bagi pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.

Untuk itu Sahli menghimbau penyelenggaraan kegiatan FGD satu data ini untuk menciptakan data statistik yang akurat sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara, membantu Kabupaten Buton untuk hadir didalam penyediaan

data dalam mendukung pembangunan setiap tahun.

“Kepada BAPPEDA selaku Koordinator Satu Data Indonesia Kabupaten Buton dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, DISKOMINFO dan Persandian sebagai walidata kegiatan statistik sektoral, dan BPS Kabupaten Buton sebagai pembina statistik serta dinas/

instansi lainnya sebagai produsen data dan memberikan pelayanan data yang cepat, mudah dan murah.

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Desa Cinta statistik serta penyajian materi dari BPS dan Diksominfo. (\*)

## Darwanita Persatuan Sultra Kunker di Buton Selatan



**Laporan : Eron**

BUSEL, BP-Kunjungan Kerja (Kunker) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton Selatan dalam rangka Pembinaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Buton Selatan. Ny. Iffah Insyirah Mukti Parinringi, SE Ketua Dharma Wanita Per-

satuan Kabupaten Buton Selatan bersama seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Buton Selatan menerima kunjungan kerja di Gedung Wisata di sambut dengan tarikan serta pengalungan bunga, pada Rabu 09/10/2024.

Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Waode Munanah Asrun Lio dengan rombongan langsung menuju Gedung Wisata. Dalam kun-

jungan tersebut Ketua Pengurus DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Waode Munanah Asrun Lio menyampaikan, tujuan dari Kunker ini untuk Menyamakan Program Persepsi dari Pusat ke Provinsi hingga ke Kabupaten/kota, serta dalam rangka Pembinaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Buton Selatan. (\*)

## Tim Penilaian Lomba 10 Program PKK Kunjungi Desa Kaongkekea

**Pewarta: Rahim**

BUTON, BP-Tim Penilaian Lomba 10 Program PKK kunjungi Desa Kaongkekea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Ketua TP. PKK Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Naharia Haruna, S.PKP., M.M. Bersama Anggota dan Kader PKK Kabupaten Buton menyambut rombongan Tim Penilai di Pelataran Aula Kantor Desa Kaoengkekea, Kecamatan Pasarwajo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Kedatangan tim penilai juga disambut Pj. Bupati Buton yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Buton, Nanang Lakaungge, SKM, MSi, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, Camat Pasarwajo, Drs. Amruddin, Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Buton La Haruna SP, M.Si yang dibacakan Asisten II Sekda Buton, mengucapkan selamat datang ke-

pada Tim Lomba 10 Program PKK tingkat Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton yakni di Desa Kaoengkeongkea.

Pj. Bupati Buton mewakili Pemerintah daerah menghimbau agar PKK dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga, kegiatan posyandu maupun lansia, kegiatan pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, penyuluhan makanan beragam, bergizi dan berimbang serta pemanfaatan gerakan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

“Saya berharap pula melalui lomba ini, kita dapat menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan di lapangan demi kemajuan Bersama.” katanya.

Pada kesempatan ini pula Sekretaris TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Devi Yunariasari menyampaikan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang menjadi program kerja tim PKK provinsi Sulawesi Tenggara.

“Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menumbuhkan jiwa semangat pengabdian serta kompetensi kemampuan para kader PKK dan juga untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan 10 program PKK secara berjenjang mulai dari desa/kecamatan, kabupaten, maupun Kabupaten/kota dan juga sebagai sarana apresiasi terhadap para kader yang berada di pelosok-pelosok pendesaan yang berhasil mengimplementasikan 10 program PKK dengan efektif,” katanya. (\*)

# Kesehatan Ibu dan Anak Makin Terjamin, Dokter Spesialis Obsgin Lulusan Luar Negeri Ditugaskan di NTT



Laporan: Yeti

JAKARTA- Sebagai bagian dari upaya pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia, Komite Bersama Adaptasi, yang terdiri dari unsur Kemenkes, Kemendikbud, Kolegium, Konsil dan Pakar, melakukan penempatan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obsgin) WNI lulusan luar negeri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 6 November 2024. Penempatan ini untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis spesialis.

Dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang melaksanakan adaptasi, atau disebut sebagai Adaptan, mendapatkan kesempatan untuk memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia serta tantangan khusus di daerah

dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Proses ini diharapkan dapat mempercepat integrasi dokter ke dalam sistem kesehatan Indonesia dan meningkatkan kualitas pelayanan medis di daerah yang membutuhkan.

Kolegium Obstetri dan Ginekologi juga menyoroti pentingnya memperbaiki akses masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Kabupaten Lembata dan daerah-daerah sekitarnya di NTT menghadapi kekurangan tenaga medis spesialis, yang mengakibatkan terbatasnya akses layanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam hal persalinan yang aman dan perawatan kesehatan reproduksi. Penempatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan layanan kesehatan di NTT dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya

bagi ibu hamil dan perempuan.

Penempatan juga ini merupakan contoh konkret dari sinergi dan koordinasi yang terus dilakukan oleh Kolegium Obsgin dengan Kemenkes setelah perubahan struktur di bawah Konsil Kedokteran Indonesia yang kini berubah menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Dengan adanya penempatan dokter spesialis obsgin di RSUD Lewoleba, Kolegium Obsgin berkomitmen untuk berperan dalam mempercepat pemerataan tenaga medis spesialis obsgin di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan pelayanan medis yang mereka butuhkan.

“Terima kasih kepada Kolegium Obstetri dan Ginekologi (Obsgin) yang telah mempercepat proses adaptasi bagi para diaspora obsgin. Semoga inisiatif positif ini dapat

menjadi teladan bagi kolegium-kolegium lainnya, sehingga proses adaptasi bagi tenaga medis profesional dapat lebih cepat dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat semakin mudah dan merata.

Langkah ini sangat berarti dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Hingga November 2024, Kemenkes telah menempatkan 30 orang dokter spesialis lulusan luar negeri di berbagai rumah sakit daerah di Indonesia, di antaranya di Sulawesi Utara, Aceh, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, NTT, NTB, dll. Para adaptan tersebut merupakan lulusan dokter spesialis dari Filipina, Jerman, Cina, Malaysia, Jepang, dan Inggris.\*

## Tindakan Nyata adalah Kunci Menghadapi Tantangan Kesehatan



JAKARTA-Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menghadiri acara puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan tema “Gerak Bersama, Jakarta Berdaya” di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Senin (11/11/2024).

Dalam sambutannya, Prof. Dante mengatakan, peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama dan bertindak nyata, karena hal itu merupakan kunci untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan.

Berkaca dari sejarah keberhasilan Indonesia melawan Malaria pada 1964, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai program pemberantasan malaria dengan penyemprotan DDT secara besar-besaran di seluruh Nusantara dan mencapai puncak pada 12 November 1964.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan dan memperkuat sistem kesehatan nasional,” kata Prof. Dante.

Prof. Dante melanjutkan, saat ini dunia kesehatan menghadapi banyak tantangan yang makin kompleks dan beragam, mulai dari penyakit menular seperti TBC, penyakit tidak menular, serta permasalahan akses layanan kesehatan.

“Ini menuntut kita memiliki sistem layanan rujukan yang efisien, agar pasien mendapatkan penanganan lanjutan yang tepat di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya,” lanjut Prof. Dante.

Dalam peringatan puncak HKN ke-60 tingkat provinsi, DKI Jakarta juga meluncurkan sebuah sistem pelayanan kesehatan, yaitu “JakConnected”. Ini merupakan sebuah sistem yang dapat menghubungkan seluruh fasilitas pelayanan di wilayah DKI Jakarta untuk mempermudah rujukan pasien.

Prof. Dante sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, termasuk di kotakota administrasinya, atas usaha dan penerapan teknologi informasi melalui JakConnected.

“Namun, teknologi saja tidak cukup, butuh tenaga kesehatan terlatih, pemahaman masyarakat, serta sinergi dari seluruh pihak terkait untuk ikut serta dalam menyukseskan sistem JakConnected tersebut,” kata dia.

Beberapa penghargaan juga diberikan kepada wilayah dan perkampungan yang menjadi contoh teladan dari komitmen kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, di antaranya Kampung Siaga TBC, Kampung Bebas Jentik, dan Kampung Bebas Asap Rokok.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Marullah Matali, dalam sambutannya, menyampaikan,

salah satu aspek penting dalam mewujudkan Jakarta Kota Global adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif.

“Terima kasih kepada para Wali Kota, Camat, dan Lurah atas peran aktif dalam pengendalian berbagai penyakit menular berbasis komunitas. Saya ucapkan selamat kepada para kampung penerima penghargaan,” kata Dr. H. Marullah Matali.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama terlibat dalam menciptakan gerakan hidup sehat yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, berolahraga 30 menit setiap hari, menjaga pola makan sehat, serta kebersihan lingkungan sekitar,” ujar Dr. H. Marullah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan berbagai elemen masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan sektor kesehatan, baik dalam operasional maupun pengembangan layanan.

“Bersama kita terapkan gaya hidup masyarakat Jakarta yang lebih sehat dan produktif,” kata Dr. H. Marullah menutup sambutannya.\*

Harian Pagi

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima Imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi

Redpel : Hengky TA

Korlip : Hengky T.A

Redaktur : Alyakin, Kasrun

Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Ririn

Pracetak : Aditya

Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika

Komisaris : Erna Agule

Direktur Utama : Andina Latief, SKM

Manager Keuangan : Nabila D.A

Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan

Kepala Sirkulasi : Jamal

Administrasi : Salvana

Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman

Kepala Biro Buton Utara : Fauzan

Kepala Biro Buton : Rahman

Kepala Biro Busel : Salvana

Kepala Biro Buteng : Andini

Kepala Biro Bombana : -

Kepala Biro Sultra : -

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr

Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,

Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya

Agen Pasarwajo : -

Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau

Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com

Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

## Irjen Karyoto soal Kasus Firli Mangkrak: Tenang Saja, Nanti Selesai



Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto

JAKARTA-Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto merespons santai soal dugaan pemerasan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang dianggap mangkrak dan tak kunjung tuntas.

Firli telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Artinya, dua hari lagi, genap satu tahun Firli menyanggah status tersangka.

"Tenang saja, nanti selesai," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (20/11).

Kini, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta justru digugat lantaran tak kunjung merampungkan kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta

Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Kasus Firli Bahuri 'Mangkrak', Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Digugat

Terkait gugatan ini, Karyoto pun merespons santai dan tak banyak berkomentar.

"Enggak apa-apa, dia kalau enggak gitu, enggak terkenal itu," ucap dia.

Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 No-

vember 2023.

Dalam kasus ini, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Setelah hampir setahun berstatus tersangka, tak ada perkembangan berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Firli tercatat sempat

kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Namun, dua kali ia tak hadir.

Di sisi lain, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya turut mengusut dua perkara lain yang juga menjerat Firli.

Yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Terkait kasus dugaan pelanggaran UU KPK, penyidik telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. (\*)

## Cadewas Sebut Ada Geng di KPK: Mereka Lakukan Kolusi Nepotisme



### Laporan: Hadi

JAKARTA-Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK, Mirwazi menyoroti praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan para pegawai komisariat untuk keuntungan dan memperkaya diri pribadi.

Menurut Mirwazi, kondisi itu selama ini terjadi karena penempatan pegawai yang terlalu lama. Pernyataan itu disampaikan Mirwazi dalam lanjutan fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (20/11).

"Penempatan pegawai KPK itu terlalu lama, terlalu lama di suatu tempat, sehingga mereka melakukan kolusi nepotisme di dalamnya untuk membuat suatu geng yang bisa memeras tahanan tersebut untuk bisa mendapat-

kan keuntungan bagi mereka," kata Mirwazi dalam paparnya.

Menurut Mirwazi, masalah tersebut akan menjadi prioritasnya jika terpilih menjadi pimpinan Dewan KPK untuk periode 2024-2029.

Dia mengaku akan membuat peraturan bersama dengan pimpinan KPK agar pegawai tidak ditempatkan terlalu lama di satu tempat atau bagian tertentu.

"Jadi apabila kami terpilih nanti sebagai Dewan Pengawas KPK, kami akan mengatur regulasi tentang penempatan personel KPK sehingga personel KPK itu tidak jenuh di suatu tempat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diperlukan," katanya.

Mirwazi merupakan

an satu dari 10 nama calon pimpinan Dewan yang menjalani fit and proper test di DPR. Dia berlatar belakang seorang polisi dan sebelumnya dikenal sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh.

Mirwazi memiliki catatan panjang dalam memberantas kasus-kasus narkotika. Salah satu kasus yang pernah diusutnya adalah dugaan pencucian uang hasil penjualan narkotika dan temuan ladang ganja seluas 1,5 hektar di wilayah Aceh.

DPR akan memilih dan menetapkan 10 nama, masing-masing dari Dewan dan Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya hingga 2029 pada Kamis (21/11). (\*)

## Eks Penyidik KPK: Keinginan Johanis Tanak Hapus OTT Berbahaya

JAKARTA-Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai keinginan calon pimpinan KPK Johanis Tanak menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Menurut Yudi, pernyataan Tanak itu cuma strategi agar lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi

III DPR.

"Pernyataan Johanis Tanak ingin hapus OTT hanya strategi untuk mengambil hati DPR, tapi pernyataan ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Koruptor akan terdawa," ujar Yudi melalui pesan tertulis, Rabu (20/11).

Ia mengatakan sangat sulit menghapus OTT karena telah terbukti menjadi cara efektif untuk menangkap banyak koruptor yang

melakukan transaksi suap. Selain itu, dari OTT pula diketahui perkara lain yang lebih besar.

"Menangkap koruptor itu menggunakan dua cara: penyelidikan terhadap kasus yang sudah terjadi dan kasus ketika tertangkap tangan. Kalau satu hilang, OTT KPK akan pincang," ucap Yudi.

Mantan Ketua Wahid Pegawai KPK ini menegaskan dasar hukum OTT

sudah jelas diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KPK mempunyai kewenangan untuk itu.

Meski terdapat penurunan jumlah penanganan kasus lewat strategi tersebut, lanjut Yudi, OTT tetap masih diperlukan.

"OTT adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang tegas dan keras tersebut," ucap dia.



Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keinginan Johanis Tanak menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), Johanis Tanak mengaku akan menghapus OTT

apabila terpilih menjadi komisioner KPK.

Ia menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHP.

"Seandainya bisa jadi, mohon izin,

jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHP," kata Johanis disambut tepuk tangan para anggota dewan. (\*)

1



CALON BUPATI  
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI  
Drs. H. RASYID  
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU,  
DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN  
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
5. MENGOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI  
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
ARIS MARWAN SAPUTRA,  
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN  
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF.
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRASPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI  
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI  
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI  
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,  
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAH DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MEMILIKI KELUANGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2024-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA, SERTA TERJANGKAU.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA, PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORMA KEAGAMAAN.
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAIKAN KARASITAS DAERAH.

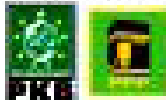
5



CALON BUPATI  
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
LAODE MUHAMAD  
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI  
ALVIN AKAWIJAYA  
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI  
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDISIF DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.